

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG MASALAH

Kabupaten Purbalingga adalah sebuah kabupaten di provinsi Jawa Tengah. Kabupaten ini berbatasan dengan Kabupaten Pemalang di utara, Kabupaten Banjarnegara di timur dan selatan serta Kabupaten Banyumas di barat. Purbalingga berada di cekungan yang diapit beberapa rangkaian pegunungan. Di sebelah utara merupakan rangkaian pegunungan (Gunung Slamet dan Dataran Tinggi Dieng). Bagian selatan merupakan Depresi Serayu, yang dialiri dua sungai besar Kali Serayu dan anak sungainya, Kali Pekacangan. Ibukota Kabupaten Purbalingga berada di bagian barat wilayah kabupaten, sekitar 21 km sebelah timur Purwokerto. Jarak Ibu Kota Kabupaten Purbalingga ke Ibu Kota Provinsi Jawa Tengah adalah 191 km.

Kabupaten Purbalingga memiliki wilayah seluas 77.764 ha atau sekitar 2,39 persen dari luas wilayah Provinsi Jawa Tengah. Secara administratif Kabupaten Purbalingga terdiri dari 18 kecamatan, 224 desa, 15 kelurahan, 886 dusun, 1.530 RW, 4.968 RT. Purbalingga yang berpenduduk 848.952 jiwa (berdasarkan Sensus Penduduk Tahun 2010) ini dikenal sebagai kabupaten yang

pro-investasi. Hal ini terlihat dari banyaknya industri kecil hingga besar yang tumbuh dan berkembang di Purbalingga.¹

Bahkan, puluhan industri penanaman modal asing (PMA) yang sebagian besar berasal dari Korea Selatan juga banyak berdiri di Purbalingga guna mengembangkan industri pembuatan rambut dan bulu mata palsu. Keberadaan industri rambut dan bulu palsu di Purbalingga juga berdampak pada berkembangnya ratusan plasma-plasma dari perusahaan tersebut, sehingga dapat meningkatkan pendapatan masyarakat dengan bekerja sampingan sebagai pembuat rambut dan bulu mata palsu. Tidak kurang dari 43.000 tenaga kerja perempuan terserap oleh perusahaan-perusahaan PMA tersebut. Ini belum termasuk tenaga kerja di plasma-plasma industri yang bertebaran di seantero wilayah Purbalingga. Sepanjang tahun 2012 realisasi penanam modal di Purbalingga mencapai Rp. 342,5 miliar. Terdiri dari sektor perdagangan sebesar Rp. 183 miliar, jasa konstruksi Rp. 60 miliar, reklame Rp.1,75 miliar, industri Rp. 92 miliar, pertambangan Rp. 4,25 miliar, dan sektor lainnya Rp. 1 miliar. Realisasi investasi tahun 2012 mengalami peningkatan dibanding tahun sebelumnya yang hanya Rp. 339, 7 miliar,-²

Di sektor pariwisata sudah tidak asing lagi Owabong, adalah wahana permainan air yang terkenal yang banyak dikunjungi oleh masyarakat lokal Purbalingga dan luar Daerah Purbalingga. Karena keasriannya Owabong menjadi

¹ <http://www.jatengprov.go.id/id/profil/kabupaten-purbalingga> diakses pada tanggal 15 November 2014

² <http://www.otda.kemendagri.go.id./index.php/berita-210/450-semakin-mantap-sebagai-daerah-investasi> diakses pada tanggal 15 November 2014

salah satu tujuan utama saat berkunjung di Purbalingga. Beralih ke sektor industri. Berbicara mengenai industri, sering kali dikaitkan dengan ekonomi. Berbagai potensi yang dimiliki oleh Purbalingga dalam sektor industri mampu mendorong majunya perkembangan dan pembangunan ekonomi di Purbalingga itu sendiri.

Industri di Purbalingga didukung oleh banyak pihak yang berkontribusi untuk memajukan industri di Purbalingga. Industri yang berkembang pesat untuk saat ini salah satunya adalah industri yang berhubungan dengan rambut, rambut disini diolah menjadi berbagai macam produk seperti rambut palsu dan bulu mata palsu. Sektor ini sangat menguasai di Purbalingga dan berkontribusi dalam memajukan kesejahteraan khususnya dalam hal ekonomi dengan membuka banyak lowongan pekerjaan sehingga dapat mengurangi jumlah pengangguran khususnya di daerah Purbalingga sendiri.

Selain sektor industri, di Purbalingga juga banyak terdapat kerajinan yang dikembangkan masyarakat setempat, antara lain pembuatan knalpot, gula kelapa, dan sapu glagah. Kabupaten Purbalingga juga dikenal sebagai salah satu sentra penghasil sayuran terutama cabai serta buah stroberi yang berlokasi di lereng Gunung Slamet sebelah tenggara. Selain itu, keberadaan Purbalingga juga semakin dikenal dengan berbagai perkembangan objek wisata buatan di kabupaten ini, antara lain Owabong dan Sanggaluri Park. Kendati demikian, sektor pertanian tetap memberikan kontribusi terbesar bagi PDRB Purbalingga, yakni sebesar 31,98 persen disusul sektor perdagangan/hotel/restoran yang sebesar 18,51 persen serta sektor jasa sebesar 17,98 persen.

Investasi sebagai faktor terpenting untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pertumbuhan investasi berdampak meluasnya kesempatan kerja bagi masyarakat Purbalingga, mengurangi angka pengangguran dan meningkatnya pertumbuhan ekonomi. Kabupaten Purbalingga dikenal sebagai surganya para investor asing untuk menanamkan modal di wilayah ini. Selama beberapa tahun terakhir ini kurang lebih sudah ada terdapat 20 industri dalam negeri dan asing yang berdiri di kabupaten Purbalingga. Keberadaan PMA sangat membantu program pemerintah dalam menekan angka pengangguran di Purbalingga. Karenanya, pemerintah Kabupaten Purbalingga pun menerbitkan kebijakan-kebijakan pro investasi. Berbagai produk hukum berupa peraturan daerah (perda) dan peraturan bupati (perbup) memudahkan semua calon investor yang berminat menanamkan modalnya. Melalui Kantor Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu (KPMPT), segala urusan perizinan menjadi lebih mulus.

Perkembangan suatu bangsa khususnya pembangunan ekonomi sebagai titik beratnya harus ada acuan pada peningkatan kesejahteraan rakyat. Kegiatan investasi merupakan salah satu faktor yang sangat penting untuk menciptakan sarana dan prasarana dalam pembagunan sehingga pemerintah selalu berusaha menarik pengusaha asing guna menanamkan modalnya agar ikut mendorong pertumbuhan ekonomi melalui kegiatan investasi. Saat ini pemerintah Indonesia sedangkan melakukan perubahan-perubahan sistem diberbagai bidang dan meningkatkan sumberdaya manusia demi tercapainya tujuan dari pembagunan nasional adalah untuk menciptakan stabilitas sosial, politik, ekonomi, dan salah

satu penyebab rendahnya tingkat pertumbuhan ekonomi Indonesia adalah kelangkaan modal. Dan untuk memperoleh modal, pemerintah berusaha menarik pihak-pihak asing untuk mengalihkan dan mengembangkan usahanya ke Indonesia.

Modal merupakan faktor utama dalam pelaksanaan pembangunan. Masalah kelangkaan modal banyak dihadapi oleh negara-negara berkembang dalam pelaksanaan pembangunan. Ini disebabkan oleh beberapa faktor yang juga menjadi karakteristik atau ciri umum dari setiap Negara berkembang antara lain³:

1. Standar hidup yang relative rendah, sebagai akibat dari tingkat pendapatan yang rendah, ketimpangan pendapatan yang parah, kurang memadainya pelayanan kesehatan dan pendidikan,
2. Tingkat produktifitas yang rendah,
3. Tingkat pertumbuhan penduduk serta beban ketergantungan yang tinggi.
4. Angka pengangguran terbuka maupun terselubung yang sangat tinggi dan akan terus bertambah tinggi, sementara penyediaan lapangan kerja semakin terbatas,
5. Ketergantungan pendapatan yang sangat besar kepada sector produksi pertanian serta ekspor produk-produk primer (bahan mentah).
6. Pasar tidak sempurna dan informasi yang tersedia pun sangat terbatas,
7. Dominasi ketergantungan, kerapuhan yang parah pada hamper semua aspek hubungan internasional.

Beberapa factor tersebut tidak bisa dihindari, Indonesia pun mengalami hal tersebut.

Untuk mengatasi kekurangan modal pembangunan yang nantinya akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan karakteristik diatas menjadi lebih baik dari sebelumnya. Sumber luar negeri berperan mengatasi kekurangan tabungan

³Michael P.Todaro, *Pembangunan Ekonomi Di Dunia Ketiga*, Jakarta, Erlangga, 1998. Hal 45-46

modal. Adapun bentuk-bentuk dari penanaman modal asing antara lain investasi asing secara langsung (*foreign direct investment*), investasi tidak langsung berbentuk portofolio, secara kredit import. Dari bentuk-bentuk ini yang menonjol adalah investasi secara langsung (*foreign direct investment*) baik yang bersifat penuh maupun patungan (*joint direct investment*) dengan kekuatan ekonomi domestik. Investasi asing ini merupakan sumber-sumber baru yang dibutuhkan oleh negara berkembang dalam membangun masa depannya.⁴

Di era globalisasi pengejaran pertumbuhan merupakan tema sentral dalam ekonomi semua negara di dunia, tidak terkecuali Indonesia. Indonesia merupakan salah satu negara berkembang dan merupakan anggota ASEAN dengan kekuatan ekonomi global di Asia. Indonesia terus mendapatkan pemberitaan yang positif. Pemberitaan tersebut mencerminkan ketahanan Indonesia dalam menghadapi krisis keuangan global, meningkatkan angka penilaian terhadap pemerintahan dan kredit eksternal, juga kemampuannya untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang timbul akibat perubahan-perubahan yang terjadi di panggung politik dalam negeri.⁵

Sebagai praktek pemerintahan yang baru, kerjasama luar negeri atau yang disebut paradiplomasi di Indonesia memerlukan kebijakan umum atau semacam *master plan* yang dapat menjadi *guidance* bagi daerah untuk melaksanakan kerjasama luar negeri. Pemerintah pusat melalui Kementerian Luar Negeri dan

⁴Steven J.Rusen dan Walter S.Jones, *The logic of International Relations inc.* Massachussetts,1980, hal.150

⁵ www.bkpm.go.id/contents/general/4/perekonomian-yang-sehat#/vbayz6pyn_g Perekonomian yang Sehat diakses pada tanggal 28 November 2014

Kementrian Dalam Negeri perlu mengarahkan orientasi kerjasama luar negeri yang dilakukan oleh pemerintah daerah, sebab dalam praktek selama ini, pemerintah daerah terlalu leluasa menentukan parter kerjasama dengan pihak asing, sehingga sering nilai kemanfaatannya kurang jelas dan kurang mendukung kebijakan makro hubungan luar negeri secara maksimal, misalnya kebijakan pasar bebas.

Sejak diberlakukanya otonomi daerah di Indonesia, pemerintah pusat memberikan wewenang kepada masing-masing kepala daerah tingkat kabupaten dan provinsi di seluruh Indonesia untuk mengurus rumah tangganya sendiri. Dalam konsep otonomi daerah, pemerintah dan masyarakat disuatu daerah memiliki peranan yang penting dalam peningkatan kualitas pembangunan di daerahnya masing-masing. Hal ini terutama disebabkan karena dalam otonomi daerah terjadi peralihan kewenangan yang pada awalnya diselenggarakan oleh pemerintah pusat kini menjadi urusan pemerintah daerah masing-masing.

Meskipun demikian beberapa daerah di Indonesia masih mempunyai tingkat pertumbuhan ekonomi yang rendah. Salah satu penyebab rendahnya tingkat pertumbuhan ekonomi di beberapa daerah di Indonesia adalah kelangkaan modal dan untuk memperoleh modal pemerintah harus berusaha menarik pihak-pihak asing untuk mengalihkan dan mengembangkan usaha ke beberapa daerah di Indonesia.

Dalam pelaksanaan otonomi daerah, pemerintah kota dan pemerintah kabupaten akan memiliki kewenangan yang cukup untuk melakukan identifikasi,

perencanaan dan evaluasi pembangunan daerah mereka. Dengan demikian pemerintah kota dan kabupaten harus siap menyiapkan program pembangunannya secara konseptual dan operasional. Kedudukan pemerintah kota dan kabupaten sebagai basis pembangunan negara berdaulat, hal demikian dapat dikatakan bahwa keberhasilan otonomi daerah akan banyak tergantung pada seberapa jauh partisipasi pemerintah kota dan pemerintah daerah dalam hal ini kegiatan pembangunan diwilayahnya masing-masing. Otonomi daerah diharapkan lebih menopang negara kesatuan agar dapat berperan dalam era globalisasi dan memberi kemudahan dalam dunia usaha dan penanaman modal.

Ada kecenderungan yang mengkhawatirkan berbagai pihak bahwa pemerintah daerah sering kali merusak tatanan yang sudah ada. Apa yang sudah disepakati sebelumnya baik melalui kontrak dalam maupun luar negeri sering kali diancam untuk ditinjau kembali yang dengan alasan otonomi daerah. Kalangan pengusaha asing dan domestik sering kali merasa terganggu dengan sikap politisi dan birokrasi lokal yang mencoba mengutak-atik apa yang sudah disepakati sebelumnya. Padahal dengan diberlakukannya otonomi daerah diharapkan lebih meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan sekaligus memperkuat kemampuan daerah dan nasional untuk menghadapi era globalisasi.

Pertumbuhan suatu daerah merupakan tema sentral dalam kehidupan ekonomi semua negara di dunia dewasa ini, tidak terkecuali Indonesia sebagai negara yang berkembang. Salah satu penyebab rendahnya tingkat pertumbuhan ekonomi Indonesia adalah kelangkaan modal dan untuk memperoleh modal pemerintah berusaha menarik pihak-pihak asing untuk mengalihkan dan

mengembangkan usaha ke Indonesia. Kabupaten Purbalingga mempunyai pesona budaya daerah dan keindahan alamnya yang khas. Terletak ditengah–tengah kabupaten yang padat dengan penduduk membuat potensi penanaman modal di Kabupaten Purbalingga memiliki peluang yang besar.

B. TUJUAN PENULISAN

Dalam penulisan ini penulis bertujuan untuk mengetahui bagaimana strategi kerjasama luar negeri Pemerintah Kabupaten Purbalingga dalam rangka meningkatkan investasi asing dengan teori yang relevan serta membuktikan sebuah hipotesa dengan fakta yang ada dan data yang ada.

Selain itu tujuan lain dari penulisan skripsi ini adalah untuk memenuhi tugas akhir dalam menyelesaikan program S1 di jurusan Ilmu Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, dan penulisan skripsi ini ditujukan pula sebagai perwujudan teori-teori yang penulis terima selama dibangku kuliah yang berhubungan dengan mata kuliah, dan juga untuk menambah bahan bacaan bagi mereka berminat mengetahui bagaimana upaya Kabupaten Purbalingga dalam meningkatkan investasi asing yang bisa meningkatkan perekonomian dan menciptakan kemakmuran bagi masyarakat setempat juga kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi.

C. POKOK PERMASALAHAN

Dari uraian diatas maka rumusan permasalahan yang dapat dikemukakan adalah sebagai berikut :

Bagaimana strategi pemerintah Kabupaten Purbalingga dalam rangka peningkatan investasi asing tahun 2012-2015?

D. KERANGKA PEMIKIRAN/TEORI

Untuk menjawab permasalahan diatas penulis memerlukan kerangka dasar pemikiran. Kerangka dasar pemikiran ini digunakan sebagai landasan teoritis yang relevan dengan permasalahan yang diangkat oleh penulis.

1. Hubungan Transnasional

Hubungan transnasional dapat diartikan sebagai hubungan antar masyarakat, organisasi, kelompok maupun komunitas dari negara yang berbeda. Dalam artian adalah hubungan yang terjadi dalam hubungan internasional bisa saja terjadi diantara orang yang tidak mempresentasikan negaranya.

Menurut Mohtar Mas'ood dalam bukunya aktor non negara dalam hubungan Internasional ini bisa berwujud kelompok-kelompok suku, etnis, atau separatis didalam negara, berbagai kelompok kepentingan ekonomi dan perusahaan-perusahaan multinasional bahkan bagian-bagian dari birokrasi pemerintah. Dalam pelaksanaan hubungan transnasional ini sering kali tanpa sepengetahuan pihak pimpinan negara yang terlibat, bagian-bagian dari birokrasi pemerintah suatu negara bertindak sendiri, berinteraksi langsung dengan bagian-bagian serupa dari birokrasi pemerintah negara lain. Hal itu terjadi karena pandangan kepada isu-isu sentral dalam interaksi internasional sudah berubah.

James Rosanau mendefinisikan transnasionalisme sebagai berikut :
“proses dimana hubungan internasional yang dilaksanakan oleh pemerintah telah disertai oleh hubungan individu – individu, kelompok – kelompok dan masyarakat – masyarakat swasta yang dapat memiliki konsekuensi – konsekuensi penting bagi berlangsungnya berbagai peristiwa”.

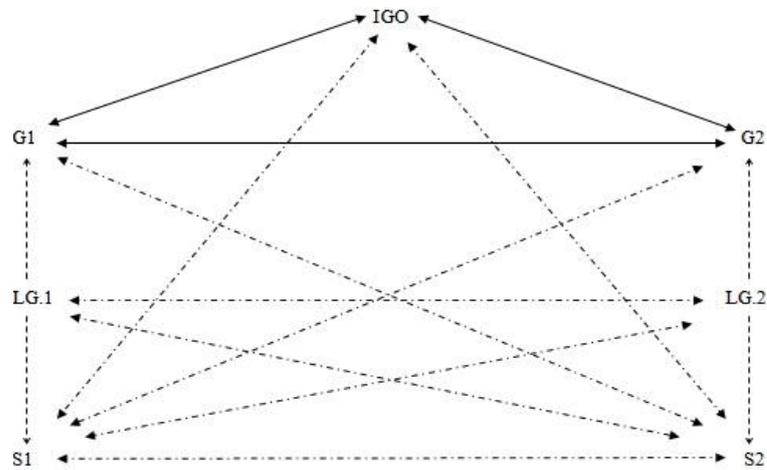
Menurut Keohane dan Nye meningkatnya hubungan antar masyarakat, organisasi dan kelompok yang menyebabkan terjadinya hubungan transnasional adalah semakin mudahnya komunikasi, transportasi, transaksi financial dan perjalanan lintas benua. Interaksi ini menimbulkan banyak efek, makin banyak terciptanya organisasi berbasis transnasional dapat berdampak pada kebijakan lokal. Semakin besarnya organisasi transnasional dapat menjadi oposisi dari kebijakan pemerintah lokal.

Pola hubungan transnasional ini melibatkan partisipasi yang lebih besar dari berbagai jenis aktor non negara, terutama dari organisasi internasional maupun perusahaan transnasional, dan tidak menutup kemungkinan akan muncul aktor baru. Kerjasama Kabupaten Purbalingga merupakan kerjasama yang dilakukan oleh aktor non negara yaitu aktor yang merupakan bagian-bagian dari birokrasi Pemerintah pusat bisa berupa pemerintah kota atau negara bagian, masyarakat pun juga dapat berinteraksi dengan masyarakat negara lain (garis putus titik). Organisasi pemerintah maupun non pemerintah dapat berhubungan secara langsung dengan masyarakat negara lain tanpa memerlukan pemerintah pusat.

Bagan pola Interaksi hubungan Transnasional dan politik antar negara dapat digambarkan dalam bagan gambar berikut ini:

Gambar 1.1

Interaksi Transnasional dan Politik Antarnegara⁶



Keterangan :

- = Hubungan Dalam Negeri
- = Hubungan Transnasionalisme
- = Interaksi sosial
- IGO = Organisasi Antar Pemerintah
- G = Pemerintah

⁶Pola Hubungan Internasional bersifat Transnasional dimana Local Government (Pemerintah Daerah) merupakan aktor/pelaku “baru” hubungan internasional, menurut Sidik Jatmika

LG = Pemerintah Daerah

S = Masyarakat

Dapat kita lihat bahwa hubungan internasional tidak hanya terjadi dalam lingkup negara saja (garis lurus) namun juga dari organisasi non pemerintah baik dalam maupun luar negeri. Bahkan masyarakat pun dapat juga berinteraksi dengan masyarakat negara lain (garis putus titik). Organisasi pemerintah maupun non pemerintah dapat berhubungan langsung dengan masyarakat negara lain tanpa melalui perantara pemerintah pusat.

Dalam pelaksanaan hubungan tersebut dapatlah diketahui bahwa pola hubungan internasional memungkinkan banyak peran aktor non negara, artinya masyarakat dari suatu negara bisa melakukan hubungan internasional dengan masyarakat dari negara lain. Dan organisasi pemerintah maupun organisasi non pemerintah dapat berhubungan langsung dengan masyarakat dari suatu negara melalui perantara pemerintah pusat.

Dengan mengambil contoh kerjasama yang diwujudkan dengan masuknya beberapa perusahaan asing yang menanamkan modalnya di Kabupaten Purbalingga yang termasuk diantaranya Korea dengan Perusahaan PT. Shung Chang Indonesia melakukan kerjasama dalam bidang Industri rambut palsu. Badan Koordimasi Penanaman Modal RI (BKPM) sebagai unsur Pemerintah Pusat (GI) oleh setelah itu diteruskan ke BKPMD dalam hal ini BKPMD Purbalingga, dalam kedudukannya sebagai Lokal Government (LG), yaitu pemerintah Kabupaten Purbalingga.

Dengan adanya kerjasama ini Kabupaten Purbalingga semakin meningkatkan investasi asingnya tetapi belum signifikan. Dari pola skema gambar tersebut dapat diketahui bahwa secara kewenangan Pemerintah Indonesia berperan sebagai fasilitator dan Kabupaten Purbalingga menjadi implementator proyek kegiatan hubungan kerjasama dengan beberapa perusahaan asing.

Untuk dapat mengetahui visi dan misi setiap daerah, tentunya memerlukan bantuan dari pihak lain yang diwujudkan dalam bentuk kerjasama. Namun sebelum ada otonomi daerah, setiap daerah yang ingin melakukan kerjasama dengan pihak lain diluar negeri sering terkendala akibat tidak mempunyai kewenangan untuk hubungan/bekerjasama dengan negara asing. Karena hubungan luar negeri masih menjadi wewenang pihak pemerintah Pusat. Oleh karena itu, kemudian pemerintah pusat undang – undang yang berisi tentang Otonomi Daerah yang didalamnya memuat kewenangan daerah untuk melakukan hubungan luar negeri/kerjasama luar negeri yang dapat dimanfaatkan untuk mengembangkan potensi dan sumber daya yang ada sehingga dapat dipergunakan untuk kesejahteraan masyarakat serta bertujuan untuk dapat mencapai visi misi daerah tersebut.

Dengan adanya otonomi daerah, aktor hubungan internasional tidak hanya negara namun juga propinsi dan kabupaten atau kota. Hal ini mempunyai implikasi terhadap pola hubungan internasional yaitu pemerintah pusat dalam hal ini BKPM RI menempatkan aparatur disetiap propinsi atau pemerintah kabupaten dan kota dapat membentuk bidang/bagian yang mengurus hubungan/kerjasama luar negeri secara otonom.

Otonomi berasal dari bahasa Yunani, *autos* yang berarti sendiri dan *nomos* berarti perintah. Otonomi bermakna memerintah sendiri. Sedangkan otonomi daerah memiliki arti wewenang hak dan kewajiban untuk mengatur dan mengurus rumah tangga sendiri sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.⁷ Meskipun sebagian wewenang pusat dilimpahkan kepada daerah namun kedaulatan, politik luar negeri, mata uang, hukum, undang-undang tetap menjadi wewenang pusat. Namun demikian, meskipun Politik luar negeri masih menjadi wilayah pemerintah pusat, adanya tekanan diplomasi dan arah kebijakan luar negeri akan diikuti oleh unsur-unsur kepentingan nasional dan daerah, dimana hubungan ekonomi internasional menjadi semakin peka terhadap ekonomi dalam negeri.

Dalam konteks kerjasama investasi asing ini pemerintah pusat hanya berfungsi sebagai fasilitator, karena politik luar negeri menjadi wewenang Pemerintah Pusat. Apabila pemerintah daerah dalam hal ini Kabupaten Purbalingga memerlukan kerja sama luar negeri maka harus terlebih dahulu mengajukan permohonan terhadap Menteri Luar Negeri melalui Direktur Perjanjian Ekososbud agar Bupati Purbalingga sebagai kepala pemerintahan daerah memiliki full power dalam penandatanganan MoU.⁸

Hal ini sesuai pola interaksi hubungan transnasional yang tidak hanya mengakui negara sebagai satu-satunya aktor hubungan internasional tetapi juga

⁷Sarundajang, 2000. *Arus Balik Kekuasaan Pusat ke Daerah*, Jakarta : PT. Gramedia Pustaka Utama hal 42.

⁸Depatemen Dalam Negeri, Biro Kerjasama Luar Negeri Jawa Tengah

aktor-aktor lain non negara, termasuk organisasi pemerintah/non pemerintah dalam negeri maupun internasional yang fokus perhatiannya bukan semata-mata pada masalah militer dan keamanan tetapi juga kepada isu ekonomi.

Dengan demikian otonomi Daerah telah memungkinkan suatu daerah atau propinsi dapat mengadakan hubungan luar negeri yang pada dasarnya sesuai dengan kerangka hubungan transnasional. Kerjasama investasi asing yang dilakukan oleh kedua belah pihak dapat dikategorikan sebagai gagasan yang melewati lintas batas negara tanpa dikendalikan oleh pusat, sehingga Kabupaten Purbalingga dapat dikategorikan dalam kerangka hubungan transnasional tersebut.

Dalam sistem internasional, khususnya dalam kehidupan bernegara tentunya sebuah negara tidak dapat terlepas dari negara lain. Kepentingan dasar negara untuk menjalin hubungan internasional dengan negara lain adalah merupakan keharusan yang tidak dapat ditawar-tawar. Dalam memenuhi kebutuhannya, setiap negara tentu harus mengadakan hubungan dengan negara lain yang diwujudkan dalam suatu bentuk kerjasama.

Menurut K.J Holsti, pendefinisian Kerjasama Internasional adalah sebagian besar transaksi atau interaksi negara dalam sistem internasional sekarang ini bersifat rutin dan hampir bebas dari konflik. Berbagai masalah nasional, regional, dan global bermunculan dan memerlukan perhatian dari berbagai negara. Banyak kasus yang terjadi sehingga pemerintah saling berhubungan atau

melakukan pembicaraan mengenai masalah yang dihadapi, berbagai perjanjian yang memuaskan semua pihak ini yang disebut dengan kerjasama internasional.⁹

Kerjasama dapat terjadi dalam konteks yang berbeda. Proses kerjasama itu tercipta dikarenakan dalam hidup bermasyarakat tidak terlepas dari hubungan antara satu dengan yang lainnya. Hubungan yang terjadi inilah yang biasa disebut dengan interaksi. Sebagian transaksi dan interaksi kerjasama terjadi secara langsung diantara dua negara yang menghadapi masalah atau hal tertentu yang mengandung kepentingan bersama¹⁰. Kerjasama dapat terjalin dalam berbagai bidang yaitu bidang ekonomi, sosial, budaya, politik, maupun pertahanan keamanan.

Dari pengertian diatas, kerjasama internasional sangat perlu dilakukan tidak hanya terbatas oleh negara tetapi juga oleh semua sektor masyarakat yang ada. Sebelum diberlakukannya UU Nomor 32 tahun 2004, kewenangan melakukan kerjasama internasional telah dimulai sejak diberlakukannya UU tentang Pemerintah Daerah tahun 1999 atau yang lebih dikenal dengan UU otonomi daerah. Dalam UU Nomor 32 tahun 2004, kewenangan daerah otonom untuk melakukan kerjasama luar negeri ini tetap berlaku sebagaimana terdapat dalam pasal 42 ayat 1, bahwa DPRD mempunyai tugas dan wewenang untuk memberikan persetujuan terhadap rencana kerjasama internasional yang dilakukan oleh pemerintah daerah.¹¹

⁹K.J. Holsti, *Politik Internasional Studi Analisis HI*. (Jakarta:Erlangga, 1998) hal. 89

¹⁰K.J. Holsti, *Politik Internasional Untuk Analisis HI* (Jakarta: Erlangga, 1998) hal.210

¹¹ Takdir Ali Mukti, *Paradiplomacy Kerjasama Luar Negeri oleh Pemda di Indonesia*, The Phinisi Press Yogyakarta, 2013 hal.3

Dengan demikian, bagi negara Indonesia kerjasama dengan negara lain sangat dibutuhkan dalam rangka untuk memecahkan permasalahan sekaligus memenuhi kebutuhannya. Hal ini menyebabkan semakin meningkatnya kiprah Indonesia didunia internasional, baik oleh pemerintah maupun aktor-aktor non pemerintah, sehingga membawa implikasi perlu ditingkatkannya peran dari masing-masing pelaku hubungan internasional tersebut.

Kabupaten Purbalingga dalam hal ini sebagai salah satu kabupaten di Indonesia yang diberikan kewenangan untuk dapat bekerjasama dengan daerah lain, baik dalam negeri maupun luar negeri, tentunya dapat menggunakan kesempatan tersebut dengan sebaik-baiknya agar dapat memecahkan permasalahan sekaligus memenuhi kebutuhan masyarakat.

2. Teori Penanaman Modal

Ada beberapa teori yang dikemukakan oleh para ahli dalam kaitanya dengan berbagai faktor yang mempengaruhi penanaman modal asing atau investasi asing disuatu negara. Dalam Teori Penanaman Modal yang dikemukakan oleh Alan M. Rugman menyatakan bahwa Penanaman Modal Asing (PMA) dipengaruhi oleh dua faktor yaitu : variable lingkungan dan variable internalisasi¹². *Pertama*, variabel lingkungan, variabel lingkungan sering dikenal dengan istilah keunggulan spesifik Negara atau spesifik lokasi.

Ada tiga unsur yang membangun variabel lingkungan yaitu: ekonomi, non ekonomi, dan modal pemerintah. Variabel ekonomi membangun fungsi produksi

¹²Sidik Jatmika, *Otonomi Daerah Dalam Perspektif Hubungan Internasional* (Yogyakarta:Bigraf Publishing, 2001) hal 78

suatu bangsa secara kolektif, yang secara definitif meliputi semua input faktor yang ada di masyarakat, antara lain tenaga kerja, modal (dana), teknologi dan tersedianya sumber daya alam dan ketrampilan manajemen yang disebut human capital¹³

Adapun variabel non ekonomi yang memotifasi masuknya modal asing adalah keseluruhan kondisi politik, hukum dan sosial budaya yang melekat pada suatu Negara. Adapun pengamat yang juga memasukan faktor pemerintahan yang bersih berwibawa pada suatu negara (*clean goverment and good governance*) baik tuan rumah (*host country*) ataupun pemerintah asal penanam modal itu. Selain sikap pemerintah yang lebih terbuka dengan segala kebijakan yang tidak memberatkan para investor asing yang ingin menanamkan modalnya juga menjadi salah satu faktor yang menentukan dalam penanaman modal asing disuatu lokasi. *Kedua*, varibel Internalisasi atau keunggulan spesifik perusahaan. Ini merupakan yang kadang juga disebut sebagai faktor spesifik pemilikan¹⁴.

Dalam Teori Penanaman Modal yang dikemukakan oleh Alan M. Rugman menyatakan bahwa penanam modal asing (PMA) dipengaruhi oleh dua faktor yaitu variabel lingkungan dan variabel internalisasi. Dalam hal ini Kabupaten Purbalingga secara umum sebagai tuan rumah (*host Country*) harus memperhatikan faktor-faktor yang sangat mempengaruhi penanaman modal asing¹⁵.

¹³Sidik Jatmika, *Otonomi Daerah Dalam Perspektif Hubungan Internasional* (Yogyakarta: Bigraf Publishing, 2001) hal 79

¹⁴ Alan M. Rugman, *Bisnis Internasional I* (Jakarta: PT. Intermedia, 1993), hal 147

¹⁵ Alan M. Rugman, *Bisnis Internasional I* Jakarta PT. Intermedia, 1993

Adapun keunggulan spesifik lokasi atau variabel lingkungan yang terdapat di Kabupaten Purbalingga adalah karena mempunyai banyak potensi, peluang dan sumber daya alam yang bisa dimanfaatkan para investor untuk menanamkan modalnya di Kabupaten Purbalingga. Sehingga pemerintah melakukan penyebaran informasi dan potensi daerah melalui promosi investasi dan kerjasama. Variabel non ekonomi yang memotifasi masuknya modal asing adalah keseluruhan kondisi politik, hukum dan sosial budaya di Kabupaten Purbalingga yang cukup kondusif untuk melakukan kerjasama atau proses investasi. Faktor pemerintah yang bersih dan berwibawa dimana sikap pemerintah yang lebih terbuka dengan segala kebijakan yang tidak memberatkan para investor asing yang ingin menanamkan modalnya juga menjadi salah satu faktor yang menentukan dalam penanaman modal asing disuatu lokasi. Pemerintah melakukan pendekatan melalui business gathering dan peningkatan kualitas pelayanan publik.

Jadi dengan adanya konsep penanaman modal Kabupaten Purbalingga diharapkan bisa mengetahui bagaimana cara berinvestasi yang menguntungkan kedua belah pihak, Kabupaten Purbalingga berupaya mencari ciri khas yang membedakan dengan daerah lain serta upaya meningkatkan daya saing iklim investasi, dan bagaimana cara meningkatkan investor asing yang mau menanamkan modalnya disuatu negara.

E. HIPOTESA

Dengan melihat latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas dan didukung oleh teori-teori yang dinggap dapat membantu analisa maka penulis

mengajukan hipotesa strategi yang diambil Pemerintah Daerah Kabupaten Purbalingga terhadap investasi asing adalah sebagai berikut :

1. Promosi investasi dan Kerjasama internasional
2. Bussines gathering dan Peningkatan kualitas pelayanan publik

F. METODE PENELITIAN

Penelitian ini bersifat eksplorasi dengan studi literatur. Metode yang bersifat eksplorasi deskriptif merupakan penelitian yang menggambarkan suatu fenomena realitas. Maka dari itu, penelitian yang menggambarkan metode kualitatif dengan mengumpulkan data sekunder melalui study kepustakaan (*library research*). Dalam penyajian data, penulis menggunakan studi literatur dalam pengambilan data dari berbagai sumber seperti buku-buku, laporan research, koran, situs-situs internet, serta berbagai media lainnya yang terkait untuk mendukung penelitian.

G. BATASAN PENELITIAN

Pembatasan ruang lingkup penelitian diperlukan untuk mempersempit fokus penelitian sehingga penelitian menjadi lebih terarah dan tidak terlalu luas pembahasannya. Penulis memulai penelitian ini di tahun 2012-2015 dimana pada tahun 2012 investasi di Kabupaten Purbalingga semakin melejit, sedangkan di tahun 2015 Pemerintah Kabupaten Purbalingga sedang menantikan terbitnya peraturan perizinan investasi yang mengacu pada paket kebijakan ekonomi jilid kedua dari pemerintah pusat.

H. SISTEMATIKA PENULISAN

Penelitian ini akan disusun ke dalam lima bab, yang sistematikanya sebagai berikut :

Bab I berisi pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, tujuan penulisan, pokok permasalahan, kerangka dasar pemikiran, hipotesa, metode penelitian, batasan penelitian dan sistematika penulisan.

Bab II menjelaskan tentang kondisi umum Kabupaten Purbalingga yang didalamnya akan membahas posisi geografis, potensi daerah, visi dan misi Kabupaten Purbalingga. Kemudian dalam bab ini juga akan dipaparkan sedikit tentang landasan hukum investasi dan masalah – masalah substansi Undang – Undang Otonomi Daerah yang sedang berlaku saat ini.

Bab III bab ini akan membahas peluang – peluang investasi. Pembahasan dalam bab ini akan sedikit melihat peluang investasi, dan hambatan – hambatan yang akan dihadapi investor dan Pemerintah Kabupaten Purbalingga.

Bab IV akan membahas bagaimana strategi Kabupaten Purbalingga dalam rangka meningkatkan investasi asing yaitu dengan meningkatkan kualitas pelayanan publik, serta mengadakan promosi investasi dan business gathering.

Bab V akan membahas mengenai Kesimpulan.